



Maria Goreti Mao  
 Tokan<sup>1</sup>  
 Maria Nona Dince<sup>2</sup>

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN SIKKA

### Abstrak

Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggungjawab pimpinan atau kepala yang bersangkutan. Pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa syarat-syarat yakni, adanya struktur organisasi, anggaran, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, pengklasifikasian kode akun, dan laporan akuntansi pertanggungjawaban. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran pada Kantor Dinas Sosial sudah sesuai atau belum. Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Data yang diperoleh dalam bentuk wawancara dan dokumentasi file-file yang diberikan langsung dari Kantor Dinas Sosial. Dari hasil penelitian yang disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran dana bantuan sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka masih belum efektif melihat dari lima indikator akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan. Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Biaya

### Abstract

Responsibility accounting is an accounting system used by companies to evaluate the performance of responsibility centers and facilitate control over the results and costs that are the responsibility of the respective managers or heads. In implementing responsibility accounting, there are several requirements, namely the presence of organizational structure, budget, separation of controllable and uncontrollable costs, classification of account codes, and responsibility accounting reports. This research aimed to determine whether or not the implementation of responsibility accounting in controlling budget at the Social Service Office was appropriate. Data were obtained in the form of interviews and documentation files provided directly from the Social Services Office. Based on the findings, it can be inferred that the implementation of responsibility accounting in controlling the social aid fund budget at the Social Service Office of Sikka Regency was still ineffective considering the five indicators of responsibility accounting that had been carried out.

Keywords: Responsibility Accounting, Cost

### PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia seiring waktu menunjukkan perkembangan, walaupun belum secepat perkembangan akuntansi di sektor swasta. Dengan perkembangan ini pemerintah mendapatkan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai aktivitas atau program dan bagaimana kinerja pemerintah sebagai wujud dari pertanggungjawaban. Seiring berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan

<sup>1</sup> Universitas Nusa Nipa, Email: mariamaotokan@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Nusa Nipa, Email: mdince33@gmail.com

yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Akuntansi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik dalam hal memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan (Hariyanto, 2012:83).

Tanggungjawab muncul sebagai akibat dari pemberian kekuasaan manajemen dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang di bawahnya. Akuntansi pertanggungjawaban ialah suatu bentuk akuntansi yang digunakan dari sisi manajemen dalam mengukur dan memberikan penilaian kinerja manajemen setiap pusat pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan kinerja manajemen dengan cara mengkomparasikan anggaran dengan pencapaian rencana anggaran (realisasi) pada suatu kurun waktu. Akuntansi pertanggungjawaban umumnya digunakan oleh perusahaan dan organisasi publik karena dalam akuntansi ini mengizinkan adanya pencatatan aktivitas atau program, menentukan unit terkait yang dibebankan tanggungjawab dengan aktivitas tersebut, dan menilai unit tersebut efisien atau tidak dalam pelaksanaannya. Pusat pertanggungjawaban membantu organisasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dapat tercermin dari pencapaian sasaran setiap pusat pertanggungjawaban (Bhaia, 2017:1).

Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten dengan perekonomian yang pesat. Sektor publik dibentuk dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai pembangunan sebagai bagian dari kebutuhan kritical masyarakat dalam bentuk pengendalian biaya sarana dan prasarana. Untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit atau bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada yaitu anggaran, serta dianalisis penyimpangan-penyimpangannya. Jadi akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem akuntansi manajemen dimana bentuk formal yang dihasilkan adalah informasi yang mangacu pada pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi.

Menurut Mulyadi, (2010) untuk dapat diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban ada lima syarat, yaitu struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen, anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen, penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi, terdapat susunan kode akun perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban serta sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab.

Effendi, dkk (2015:91), akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajemen pusat pertanggungjawabanyang bertanggungjawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, dikarenakan akuntansi pertanggungjawaban mampu membantu pusat pertanggungjawaban menjadi pengawas terhadap pengendalian biaya.

Hansen dan Mowen (2013:422), perencanaan dan pengendalian memang saling berhubungan, perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempermudah manajer dalam mencapai tujuan dengan membuat strategi dalam pencapaian tujuan dan pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai yang telah direncanakan dengan cara membandingkan dengan perencanaan sebelumnya. Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan perencanaan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan.

Menurut Bastian (2010:191), anggaran berguna sebagai alat pengendalian suatu kegiatan karena anggaran yang sudah disusun dan disetujui merupakan suatu pedoman dari penyusunan anggaran dan para pelaksana yang ikut berperan dalam penyusunan anggaran tersebut. Dengan adanya analisis selisih anggaran dapat diketahui penyimpangan yang terjadi pada suatu organisasi atau unit-unit dalam perusahaan atau organisasi.

Oleh karena itu, sangat perlu menerapkan sebuah akuntansi pertanggungjawaban yang menjadi suatu sistem untuk mengendalikan tanggungjawab pada tiap bidang kerja atau departemen. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong suatu departemen untuk mencapai tujuannya.

Penelitian tentang akuntansi pertanggungjawaban telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Ayu Mardani (2019) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PU (Pekerjaan Umum) Sumber Daya Air Comal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik, dimana manajemen belum menerapkan sepenuhnya unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban dan tidak melakukan penelusuran secara mendalam atas penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Hendri Junaidi (2015) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada PT. Pelni Kantor Cabang Tanjung Pinang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan belum memadai. PT. Pelni belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali pada anggarannya.

Penelitian dilakukan juga oleh Sulastris (2019) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas PU Kab. Enrekang belum menerapkan secara keseluruhan syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu tidak memisahkan biaya terkendali dan tidak terkendali dan pada tahun 2019 laporan akuntansi pertanggungjawaban sudah memadai dan hasil penyusunannya sudah sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Persamaan penelitian oleh Sulastris (2019) dengan penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendali anggaran. Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan anggaran sebagai alat pengendaliannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima syarat sesuai teori Mulyadi. Penelitian oleh Sulastris menunjukkan belum memadainya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pemisahan biaya, Antara biaya terkendali dan tidak terkendali dan proses penganggaran yang belum efisien. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendali anggaran pada Kantor Dinas Sosial.

Kantor Dinas Sosial merupakan salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Sikka yang bergerak di bidang sosial yang beralamatkan di jalan El tari Maumere. Kantor Dinas Sosial juga merupakan salah tempat pelayanan atau penyaluran dana bantuan sosial. Dana Bantuan Sosial sendiri merupakan pemberian bantuan sosial yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa beberapa jenis bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada Kantor Dinas Sosial telah menerapkan struktur organisasi garis dan staff, dimana setiap atasan mempunyai bawahan tertentu dan siap menerima perintah dari atasan. Hal ini menunjukkan Kantor Dinas Sosial telah melakukan pemisahan fungsional sehingga penerapan

garis wewenang dan tanggungjawab dapat dilakukan secara tegas untuk masing-masing bidang kerja. Pada struktur organisasi Kantor Dinas Sosial terdapat 3 departemen fungsional: bagian kepegawaian dan umum, bagian program data dan evaluasi, dan bagian keuangan. Adapun yang menjadi pusat pertanggungjawaban sebagai pusat anggaran adalah departemen keuangan. Dari kelima indikator dalam akuntansi pertanggungjawaban yang dibahas, ditemukan pada kantor dinas sosial belum menerapkan semua indikator dimana belum adanya pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya tidak dapat dikendalikan. Sehingga ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan tidak ditentukan siapa dan departemen mana yang harus bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut. Pada sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban pun masih sering terjadi kendala, karena penggunaan sistem yang pengimputan telah diganti dari sistem Simda (Sistem Informasi Manajemen) ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang baru, yang membuat pegawai mengalami kesulitan atau kesalahan dan proses pengimputan data.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edison selaku kasubag program keuangan Kantor Dinas Sosial terkait anggaran dan realisasi, ia mengatakan bahwa pada keseluruhan kegiatan, tidak semua anggaran dapat mencapai target. Berikut ini adalah tabel realisasi dan anggaran pada Kantor Dinas Sosial:

**Tabel 1. Laporan Anggaran Realisasi Kantor Dinas Sosial Tahun 2022**

No.	Nama Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi %
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	432.231.072,00	351.428.000,00	81,31
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	96.835.255,00	42.387.850,00	43,77
3.	Pemberdayaan Fakir Miskin	125.493.800,00	86.218.868,00	68,70
4.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial	992.774.260,00	818.279.312,00	82,42
5.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	211.438.600,00	193.001.696,00	91,28

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tabel 1. pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran 432.231.072,00 dan realisasinya 351.428.000,00 presentasi 81,31%, peningkatan sarana dan prasarana dengan anggaran 96.835.255,00 dan realisasinya 42.387.850,00 presentasi 43,77% Pemberdayaan fakir miskin dengan anggaran 125.493.800,00 dan realisasinya 86.218.868,00 presentasi 68,70%, pelayanan kesejahteraan sosial dengan anggaran 992.774.260,00 dan realisasinya 818.279.312,00 presentasi 82,42%, dan pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran 211.438.600,00 dan realisasinya 193.001.696,00 presentasinya 91,28%.

## METODE

Rancangan penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kusioner melainkan dari observasi, wawancara langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena

dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya data detail suatu data yang diteliti.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:25) penilaian deskriptif adalah penilaian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih yang mau dideskriptifkan untuk menghasilkan gambar yang mendalam dan terperinci mengenai Akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran pada Kantor Dinas Sosial. Untuk mendapatkan data mengenai akuntansi pertanggungjawaban, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan menganalisis sesuai dengan teori yang ada dan diberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Dinas Sosial membuat laporan akuntansi pertanggungjawaban satu kali dalam satu periode. Laporan tersebut dibuat oleh kabag keuangan yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala dinas. Laporan periodik ini harus diserahkan kepada komisaris atau pengawas paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan. Pelaporan ini menunjukkan bahwa pemantuan kinerja dilakukan secara berkesinambungan terhadap setiap bidang kerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun pada sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban ini masih ditemui beberapa kendala dimana sistem pengimputan yang telah berubah dari SIMDA (Sistem informasi manajemen daerah) ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Kendala yang terjadi yaitu seperti kesulitan dalam proses sinkronisasi data SKPD yang valid untuk diekspos. Adapun ketika terjadi gangguan jaringan maka sistem tidak dapat digunakan, serta penggunaan waktu pada sistem yang membuat staff sering kewalahan dalam proses pengimputan data.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Edison selaku Kasubag Program Keuangan terkait sistem pelaporan anggaran, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap tahunnya kabag keuangan membuat laporan keuangan berupa biaya-biaya pengeluaran dengan mencatat setiap pengeluaran dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan untuk kemudian diolah pada bagian keuangan yang akan menghasilkan laporan triwulan dan dilaporkan ke kepala dinas sebagai bukti transaksi pelaksanaan kegiatan. Setiap akhir tahun laporan direkapitulasi dan dilaporkan kepada kepala dinas dalam format sisa hasil anggaran. Pada sistem pelaporan anggaran dan realisasi keuangan untuk tahun 2022 sudah menggunakan sistem pengimputan yang baru yaitu SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). SIPD merupakan jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Namun pada sistem yang baru ini staff masih sering mengalami kendala yaitu kesulitan dalam proses sinkronisasi data SKPD yang valid untuk diekspos. Adapun ketika terjadi gangguan jaringan maka sistem tidak dapat digunakan, serta penggunaan waktu pada sistem membuat staff sering kewalahan dalam proses pengimputan”.

**Berikut Ini Tabel 2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dan Realisasi Pada Kantor Dinas Sosial Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
<b>01</b>	<b>Program pelayanan administrasi kantor</b>	<b>432.231.072,00</b>	<b>351.428.000,00</b>	<b>81,31%</b>
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	691.956,00	69,20
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.240.000,00	25.767.061,00	64,03
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	54.892.927,00	50.165.568,00	91,39

	perizinan kendaraan dinas			
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.882.000,00	119.014.640,00	93,80
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	18.543.675,00	92,72
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	12.089.000,00	80,59
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	840.000,00	630.000,00	75,00
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.500.000,00	10.500.000,00	67,74
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.501.100,00	35.501.100,00	100,00
01.19	Koordinasi, evaluasi, dan pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	115.550.000,00	71.700.000,00	62,05
<b>02</b>	<b>Program Sarana Dan Prasarana</b>	<b>96.835.255,00</b>	<b>42.387.850,00</b>	<b>43,77%</b>
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.210.255,00	10.000.000,00	47,15
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	70.000.000,00	27.487.850,00	39,27
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung operator	2.625.000,00	1.900.000,00	72,38
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala computer	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<b>15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	<b>125.493.800,00</b>	<b>86.218.868,00</b>	<b>68,70%</b>
15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin	4.225.000,00	2.400.000,00	56,80
15.05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	16.425.000,00	9.100.000,00	55,40
15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	104.843.800,00	74.7188.868,00	71,27
<b>16</b>	<b>Program Pelayanan</b>	<b>992.774.260,00</b>	<b>818.279.312,00</b>	<b>82,42%</b>

	<b>dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			
16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	90.298.100,00	74.263.872,00	82,24
16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	173.627.700,00	113.722.080,00	65,50
16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	728.848.460,00	630.293.360,00	86,48
<b>21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>211.438.600,00</b>	<b>193.001.696,00</b>	<b>91,28</b>
21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	207.736.950,00	189.300.046,00	91,12
21.05	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan kesetikawanan sosial	3.701.650,00	3.701.650,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.858.772.987,00</b>	<b>1.491.315.726,00</b>	<b>80,23%</b>

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Anggaran untuk program pelayanan administrasi kantor Dinas Kabupaten Sikka terdiri dari biaya penyediaan jasa surat menyurat, biaya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik, biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, biaya administrasi keuangan, biaya jasa kebersihan kantor, biaya alat tulis kantor, biaya barang cetakan dan penggandaan, biaya komponen instalasi listrik, biaya bahan bacaan dan perundang-undangan, biaya makanan dan minuman, biaya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah, dan koordinasi pendampingan tugas lainnya dalam daerah pada tahun 2022 sebesar 432.231.072,00 dan terealisasi sebesar 351.428.000,00 dengan tingkat presentasi 81,31% yang berasal dari selisih antara anggaran dan realisasi. Anggaran untuk program pelayanan administrasi mengalami selisih yang menguntungkan.
2. Anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas Kabupaten Sikka terdiri dari pemeliharaan rutin gedung kantor, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan rutin komputer pada tahun 2022 sebesar 96.835.255,00 dan terealisasi sebesar 42.387.850,00 dengan tingkat presentasi 43,77% yang berasal dari selisih anggaran dan realisasi. Pada anggaran program sarana dan prasarana terlihat bahwa penghematan yang dilakukan cukup besar. Anggaran untuk program pelayanan administrasi mengalami selisih yang menguntungkan.

3. Anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka terdiri dari Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin, pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pada tahun 2022 sebesar 125.493.800,00 dan terealisasi sebesar 86.218.868,00 dengan tingkat presentasi 68,70% yang berasal dari selisih anggaran dan realisasi. Terlihat bahwa masih rendahnya tingkat presentasi untuk program pemberdayaan fakir miskin sehingga disimpulkan bahwa dana bantuan sosial ini belum terserap sepenuhnya kepada masyarakat dengan baik karena dari anggaran tersebut yang sebenarnya anggaran itu harus diberikan kepada masyarakat namun dana tersebut masih sisa.
4. Anggaran untuk program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka terdiri dari pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak, sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan menyangkut tanggap cepat darurat pada tahun 2022 sebesar 992.774.260,00 dan terealisasi sebesar 818.279.312,00 dengan presentasi sebesar 82,42% yang berasal dari selisih anggaran dan realisasi. Anggaran pada program pelayanan dan rehabilitasi terlihat sudah terserap dengan cukup baik.
5. Anggaran untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka terdiri dari peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial pada tahun 2022 sebesar 211.438.600,00 dan terealisasi sebesar 193.001.696,00 dengan presentasi 91,28% yang berasal dari selisih anggaran dan realisasi. Anggaran untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial terlihat sudah terserap dengan baik.
6. Pada tahun 2022 terdapat selisih anggaran realisasi anggaran, penghematan tersebut jika dilihat dari persentasinya tidak begitu besar namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan. Jika dilihat dari selisih yang cukup signifikan, sangatlah mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam proses perealisasi anggarannya masih kurang, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan adanya program kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terlaksanakan.

Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang ada pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dapat dikatakan bahwa anggaran biaya yang terjadi pada tahun 2022 terhitung sudah baik karena jika dilihat dari anggaran dan realisasi dimana realisasi berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Dari keterangan diatas juga, dapat dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah memadai.

## **PEMBAHASAN**

### **Anggaran**

Anggaran secara teori diidentifikasi sebagai alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Berdasarkan teori akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggung-jawaban atau bidang harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar untuk menilai suatu kinerja suatu instansi. Pada kantor dinas sosial setiap bidang pertanggungjawaban hanya melakukan perencanaan sesuai dengan data masyarakat yang membutuhkan bantuan, melakukan perekapan serta menyeleksi apakah pemohon yang bersangkutan layak dan sudah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan bantuan sosial yang kemudian akan di ajukan kepada bendahara keuangan untuk diperiksa dan diteliti kembali serta dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelahnya data tersebut di ajukan lagi ke kepala dinas untuk disetujui melalui putusan bupati yang dilampirkan melalui surat keputusan bupati. Setelah ditetapkannya surat keputusan bupati, perencanaan anggaran tersebut diserahkan kembali kepada kabag keuangan untuk diproses. Dana tersebut setelah itu akan dicairkan melalui rekening masing-masing setiap pemohon atau diterima melalui perpanjangan tangan kantor pos. Adapun bantuan yang bukan merupakan uang

tunai seperti kursi roda, sembako dan lain-lain akan langsung diserahkan kepada penerima bantuan.

Anggaran Perbandingan hasil penelitian dengan teori penerapan akuntansi pertanggungjawaban, dikatakan bahwa Kantor Dinas Sosial telah memenuhi salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulastri (2019) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggung-jawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang menjelaskan anggaran anggaran yang ditetapkan telah terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan dan sudah melalui unsur azas partisipasi dari setiap bidang dalam proses penganggaran. Sehingga anggaran sudah dalam kategori efektif.

### **Penggolongan Biaya**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa Kantor Dinas Kabupaten Sikka belum menerapkan salah satu syarat akuntansi pertanggung-jawaban menurut Mulyadi dimana dalam hal ini pemisahan biaya. Kantor Dinas Sosial belum memisahkan pengklasifikasian biaya ini, sehingga tidak diketahui mana yang biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang menjadi tanggung-jawab individu dalam pusat pertanggungjawaban. Biaya yang tergolong kedalam biaya terkendali adalah Dalam hal ini perlu diadakan klasifikasi biaya yang jelas dengan memisahkan biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan, sehingga mempermudah pimpinan dalam mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan. Namun berdasarkan aturan pemerintahan Kantor Dinas Sosial sudah menerapkan anggaran biaya sesuai dengan ketentuan pemerintahan dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan teori akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2010) dengan penelitian yang telah dilakukan dinyatakan bahwa kantor dinas sosial belum sesuai karena belum memenuhi salah syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pemisahan biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan.

Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sulastri (2019) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang menjelaskan bahwa Kantor Dinas Sosial belum melakukannya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali karena pada kantor dinas sosial lebih meenfokuskan kepada biaya-biaya yang dapat dikendalikan saja.

### **Pengklasifikasian Kode Akun**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah melakukan pengklasifikasian kode akun. Pengklasifikasian kode akun yang digunakan dalam kantor dinas sosial sendiri ada tiga sampai empat sub digit dimana sub digit pertama merupakan sub bagian kode urusan pemerintahan, sub digit kedua adalah sub unit organisasi, sub digit ketiga merupakan sub unit organisasi dan sub digit keempat adalah sub nomor agenda. Pada setiap pos-pos biaya dicatat, kemudian digolongkan dan diberi kode sesuai dengan aktivitas atau program kegiatan termasuk biaya rutin dan non rutin sesuai dengan tingkatan manajemen yang bertanggungjawab.

Kode akun sangat berperan penting bagi laporan keuangan. Pengolahan data akuntansi sangat berguna pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasi, menyimpan dan mengambil data keuangan. Rekening dalam perusahaan atau organisasi jumlah cukup banyak, sehingga sebaiknya diberi kode Mulyadi (2010).

Perbandingan hasil penelitian dengan teori akuntansi pertanggungjawaban tentang pengklasifikasian kode akun, maka dikatakan bahwa Kantor Dinas Sosial telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pengklasifikasian kode.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdulah (2017) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada CV. Citra Niaga di Baubau yang menjelaskan bahwa kode akun sangat

penting dilakukan untuk mempermudah dalam melihat dan mengklasifikasi data keuangan yang tergolong cukup banyak.

**Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban**

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, diketahui bahwa Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka menerapkan pelaporan semua kegiatan yang terjadi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang menyeluruh dalam satu periode. Laporan yang ada hanya merupakan laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh kapid keuangan dalam satu periode.

Dalam teori akuntansi pertanggungjawaban terkait sistem pelaporan anggaran, untuk tiap-tiap pusat biaya membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya, yang berisi rincian realisasi anggaran, anggaran biaya, dan penyimpangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan realisasi dengan anggaran biaya yang telah disusun oleh masing-masing koordinator pada setiap bidang.

Perbandingan hasil penelitian dengan teori akuntansi pertanggungjawaban tentang sistem pelaporan biaya, maka dikatakan bahwa sistem pelaporan biaya yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka belum sesuai dengan teori akuntansi pertanggungjawaban, karena sistem pelaporan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka terdiri dari anggaran dan realisasi saja, sedangkan menurut teori akuntansi pertanggungjawaban laporan tersebut harus berisi rincian anggaran, realisasi dan penyimpangan terhadap anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka belum memenuhi salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pelaporan biaya.

Berikut ini tabel perbandingan antara akuntansi pertanggungjawaban menurut Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka dengan Teori Mulyadi (2010).

**Tabel 3. Perbandingan Akuntansi Pertanggungjawaban menurut Kantor Dinas Sosial dengan Teori Mulyadi (2010)**

Syarat-syarat	Menurut Mulyadi	Menurut Kantor Dinas	Keterangan
Struktur Organisasi	Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka memiliki struktur organisasi garis dan staff yang artinya sistem kepemimpinan mengalir dari jenjang dari seorang atasan hingga jenjang terbawah yang telah menetapkan tugas serta wewenang pada masing-masing bagian dengan jelas	Sesuai
Anggaran	Anggaran yang disusun untuk tiap bidang manajemen	Penyusunan anggaran pada Kantor Dinas Sosial sudah melibatkan semua bidang yang ada (sudah tercerminnya azas partisipasi)	Sesuai
Penggolongan Biaya	Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya oleh manajemen tertentu dalam organisasi	Kantor Dinas Sosial belum menerapkan salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban dalam hal ini penggolongan biaya atau pemisahan biaya menurut Mulyadi namun kantor Dinas Sosial sudah menerapkan anggaran biaya berdasarkan aturan pemerintahan yang berlaku dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan.	Belum Sesuai

Pengklasifikasian Kode Akun	Mengklasifikasi kode atau transaksi. Kode digunakan untuk menunjukan kedalam klasifikasi apa suatu transaksi dikelompokan	Kantor Dinas Sosial telah melakukan pengklasifikasian kode akun. Pengklasifikasian kode akun yang digunakan dalam perusahaan ada tiga sampai empat sub digit.	Sesuai
Sistem Pelaporan Anggaran	Tiap-tiap pusat bidang membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi rincian realisasi, anggaran, dan penyimpangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan realisasi dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing bidang.	Kantor Dinas Sosial menerapkan pelaporan semua yang terjadi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang menyeluruh dalam satu periode. Laporan ada hanya merupakn laporan anggaran dan realisasi yang dibuat oleh kabid keuangan dalam satu periode.	Belum Sesuai

Sumber: Data Olahan Penulis

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Kantor Dinas Kabupaten Sikka mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendali anggaran dana bantuan sosial, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Dinas Sosial belum memenuhi semua syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban menurut teori Mulyadi karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Namun Kantor Dinas Sosial sudah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban sesuai dengan aturan pemerintahan yang telah ditetapkan.
2. Pengendalian anggaran sudah tergolong efisien karena tidak terdapat selisih anggaran dan realisasi yang merugikan namun anggaran sepenuhnya masih belum terserap dengan baik ke masyarakat melihat dari beberapa presentasi yang masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharawati,A.,& Kiswara, E. (2010). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus pada PT. Peln Kantor Cabang Makasar) (Doctoral dissertation, Perpustakaan FE UNDIP).
- Ardiani, N. M. S., & Wirasedana, I. W. P. (2013). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 561-573.
- Arfan Ikhsan, Dkk, 2013. *Teori Akuntansi*. Bandung : Cita Pustaka Media
- Armila Krisna Warindrani. (2006). *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Cikiana, W. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Pengendalian Biaya Pada (UD. Basmalah Jarit Candipuro Lumajang).
- Effendi, A., & Bakri, S. (2015). Nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil Provinsi Lampung dengan pendekatan metode biaya perjalanan. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(3), 71-84.
- Fadhli, M. (2020). Analisis Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pt Mitra Beton Mandiri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hanum, L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Tunggal Mitra Plantation MGE-1 Estate (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Hornngren, Charles T., et al. 2008. Akuntansi Biaya. Edisi 7. Jakarta: PT INDEKS kelompok GRAMEDIA.
- Mengko, S. M., & Tirayoh, V. Z. (2015). Implementation of Accountability Accounting with Budget as a Cost Control Tool at PT. Gotrans Logistics Manado Branch. *Scientific Journal of Efficiency*, 15(03), 222-234.
- Merry Veradika Effendy, dkk. 2015. Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Manajemen (PT. Asuransi Jiwa Seraya Malang ). Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyadi.2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Naus, Maria Ewaldina Cherly and Herdi, Henrikus and Salvanos, Yan Yanitza (2019) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT.Pelni Kantor Cabang Maumere. Other thesis, Universitas Nusa Nipa.
- Paat, P. T. Q. (2013). Kajian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Operasional Pada BPR. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Pangow, F. F. (2013). Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Dasar Penilaian Prestasi Manajemen pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Purwaji, A. (2016). Akuntansi Biaya.
- Salman, Kautsar Riza. 2016. Akuntansi Biaya. Edisi 2. Jakarta: Indeks.
- Setiyanto, A. I., & Norafyana, N. (2017). Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 45-54.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumarsan. 2010. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: PT.Index.
- Supriyono. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suryani, S., Mulyadi, M., & Febrina, R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pt. Pulau Sambu Group. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 11-25.
- Soru, Selarista Selviana and Dince, Maria Nona and Goo, Emilianus Eo K. (2018) Penerapan Analisis Penerapan akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Rmah Sakit Umum Daerah dr. T. C . Hillers HS di Manado.
- Teruna, A. Y., & Noor, M. Y. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Cross-border*, 4(2), 780-795.
- Windaratri, V. L. (2017). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Hotel INNA Garuda Yogyakarta. Prodi Akuntansi UPY.